

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2022



# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

2022



## INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2022

ISSN	: 2723-2379
No. Publikasi	: 65000.2267
Katalog	: 4102004.65
Ukuran Buku	: 17,6 cm x 25,0 cm
Jumlah Halaman	: x + 48 halaman
Naskah	: BPS Provinsi Kalimantan Utara
Penyunting	: BPS Provinsi Kalimantan Utara
Gambar Kulit	: BPS Provinsi Kalimantan Utara
Diterbitkan oleh	: ©BPS Provinsi Kalimantan Utara
Dicetak oleh	: CV Kreasi Cahaya Abadi

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

# TIM PENYUSUN

---

**Pengarah:**

Slamet Romelan, SST, M.Si.

**Penanggungjawab:**

H. Trino Junaidi, SE

**Penyunting:**

H. Trino Junaidi, SE

**Penulis:**

Yeni Suryati, SST

**Pengolah Data:**

Yeni Suryati, SST

**Tata Letak:**

Yeni Suryati, SST

<https://kaltara.bps.go.id>



# KATA PENGANTAR

---

Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara 2022 merupakan publikasi tahunan yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kalimantan Utara. Sebelumnya, publikasi ini menyajikan informasi dasar yang meliputi enam bidang, yaitu kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pola konsumsi, dan perumahan. Namun, mulai tahun 2020, publikasi ini menyajikan satu topik pilihan.

Selama dua tahun terakhir, topik yang menjadi pilihan adalah tentang kesehatan karena adanya pandemi COVID-19. Tahun ini, topik dalam publikasi ini adalah ketenagakerjaan yang memberikan gambaran ketenagakerjaan sebelum dan saat pandemi COVID-19, serta pada masa pemulihan ekonomi. Data-data yang digunakan bersumber dari survei-survei BPS seperti Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan beberapa survei lainnya, serta dari instansi lain yang terkait.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan publikasi ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan publikasi berikutnya. Semoga publikasi ini bermanfaat.

Tanjung Selor, November 2022  
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Kalimantan Utara



Slamet Romelan, SST, M.Si.

# DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	ix

## **BAB I**

Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Sebelum, Selama, dan Saat Kondisi Pemulihan Ekonomi pada Masa Pandemi COVID-19 .....	I
---	---

## **BAB II**

Dampak COVID-19 terhadap Ketenagakerjaan.....	13
---	----

## **BAB III**

Perkembangan Kesejahteraan Rakyat .....	21
---	----

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.1	Indikator Ketenagakerjaan, Agustus 2019-Agustus 2022.....	3
Tabel 2.1	Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020-2022.....	16
Tabel 3.1	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.....	24
Tabel 3.2	Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara ....	26
Tabel 3.3	APS, APM, dan APK, 2019-2020.....	30
Tabel 3.4	Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen).....	34
Tabel 3.5	Angka Kesakitan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021 (Persen).....	35
Tabel 3.6	Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2021.....	37
Tabel 3.7	Persentase Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen)	37
Tabel 3.8	Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen)...	38
Tabel 3.9	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen).....	40
Tabel 3.10	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen).....	41
Tabel 3.11	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan, 2020-2021.....	44
Tabel 3.12	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan, 2020-2021.....	45
Tabel 3.13	Garis Kemiskinan Menurut Daerah, Maret 2022.....	46
Tabel 3.14	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2021.....	47

Tabel 3.15	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah, Maret 2021.....	48
------------	---	----

<https://kaltara.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.1	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2021 (Persen).....	6
Gambar 1.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Agustus 2021 (Persen).....	7
Gambar 1.3	Persentase penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Agustus 2021 (Persen).....	8
Gambar 1.4	Persentase penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Agustus 2019-2022 (Persen).....	9
Gambar 1.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2019-2020 (Persen).....	11
Gambar 1.6	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah Tempat Tinggal, Agustus 2019-2022 (Persen).....	11
Gambar 2.1	Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2020 (Persen).....	17
Gambar 2.2	Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021 (Persen).....	18
Gambar 2.3	Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal, 2020 (Persen).....	19
Gambar 2.4	Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal, 2021 (Persen).....	19
Gambar 3.1	Persebaran Penduduk Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen).....	25
Gambar 3.2	Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Utara, 2017-2021 (Persen).....	28
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2021 (Persen).....	29
Gambar 3.4	Rasio Murid-Guru, 2021/2022.....	32
Gambar 3.5	Persentase Pengeluaran Penduduk Perkapita Menurut Wilayah dan Subkelompok Makanan dan Bukan Makanan, 2021 (Persen).....	42





# BAB I

KONDISI KETENAGAKERJAAN  
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
SEBELUM, SELAMA, DAN  
SAAT KONDISI  
PEMULIHAN EKONOMI  
PADA MASA PANDEMI COVID-9



Salah satu sasaran dalam pembangunan diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja. Semakin besar kesempatan kerja yang dapat diraih oleh penduduk dalam suatu wilayah, semakin tinggi pula standar hidup penduduk dalam wilayah tersebut.

Tabel 1.1 Indikator Ketenagakerjaan, Agustus 2019-Agustus 2022

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2019	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	510 947	522 832	535 007	547 170
Angkatan Kerja	335 108	347 731	354 376	370 012
- Bekerja	320 046	330 441	338 152	353 984
- Pengangguran	15 062	17 290	16 224	16 028
Bukan Angkatan Kerja	175 839	175 101	180 631	177 158
	Persen	Persen	Persen	Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,49	4,97	4,58	4,33
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,59	66,51	66,24	67,62

Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas)

Pandemi COVID-19 yang diumumkan di Indonesia sejak Maret 2020 telah berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun perekonomian sudah mulai membaik di awal tahun 2021, namun belum mampu mengembalikan kondisi kesempatan kerja seperti sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya perkembangan indikator indikator dalam dimensi kesempatan kerja antara periode sebelum pandemi, masa ekonomi dan ketenagakerjaan terpuruk (Agustus 2020) dan pada masa pemulihan ekonomi (Agustus 2021-2022) dapat dilihat pada tabel 1.1.

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan Utara. Pada Agustus 2019, penduduk usia kerja di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 510.947 orang, dan pada Agustus 2022 mencapai 547.170 orang.

Sejalan dengan peningkatan penduduk usia kerja, jumlah Angkatan kerja juga semakin bertambah. Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 353.984 orang penduduk bekerja dan 16.028 orang pengangguran. Jika dibandingkan dengan Agustus 2020 saat maraknya pandemi COVID-19, terjadi peningkatan jumlah penduduk bekerja dan penurunan jumlah pengangguran.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya

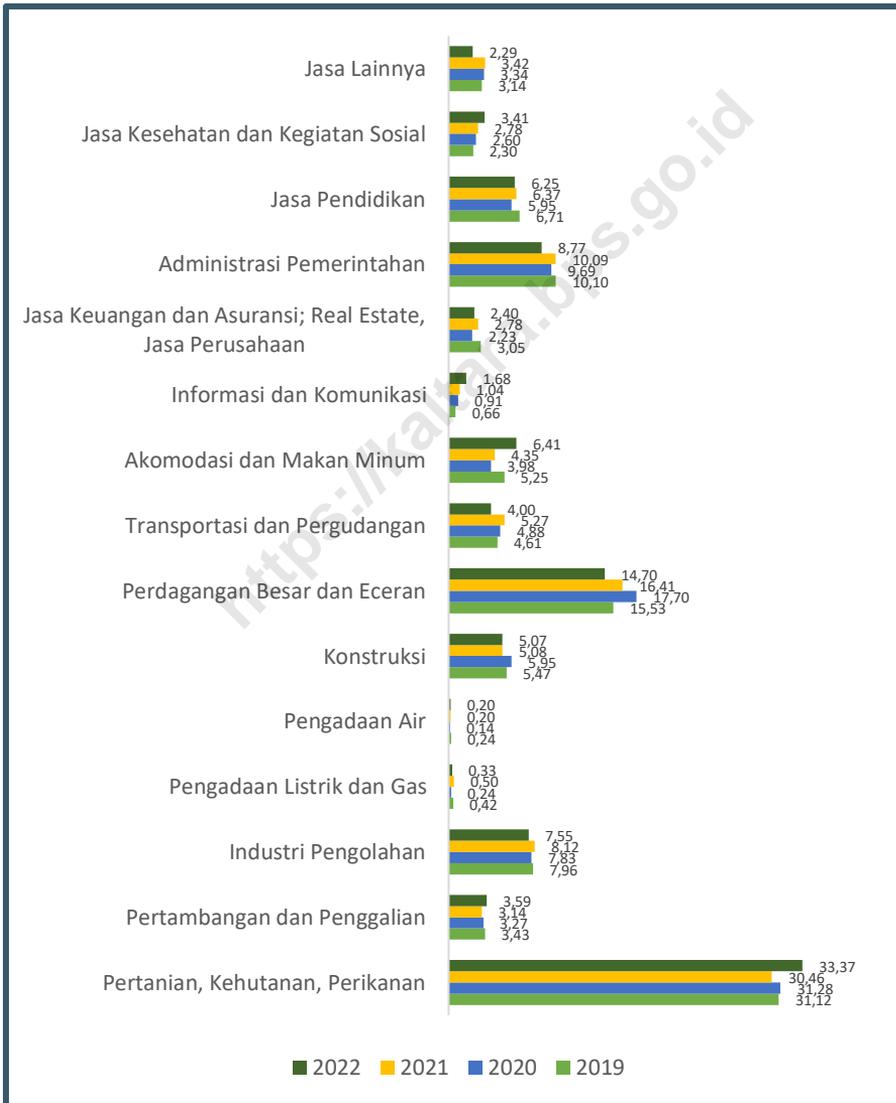
persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 67,62 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi selama empat tahun terakhir. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. TPAK laki-laki sebesar 83,67 persen, sedangkan TPAK perempuan sebesar 49,30 persen.

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus tahun 2019-2022, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Administrasi Pemerintahan. Secara umum, tidak ada pergeseran komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan saat terjadi pandemi COVID-19 hingga masa pemulihan ekonomi.

Jika dicermati lebih lanjut, lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja saat pandemi COVID-19 diantaranya Penyedia Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Pendidikan; Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; serta Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; dan Jasa Perusahaan. Penurunan terbesar pada Penyedia Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini akibat pembatasan kegiatan masyarakat yang turut menurunkan mobilitas dan aktivitas masyarakat di luar rumah. Walaupun demikian, saat ini, dengan adanya pelonggaran

pembatasan kegiatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja pada lapangan pekerjaan ini terlihat kembali meningkat.

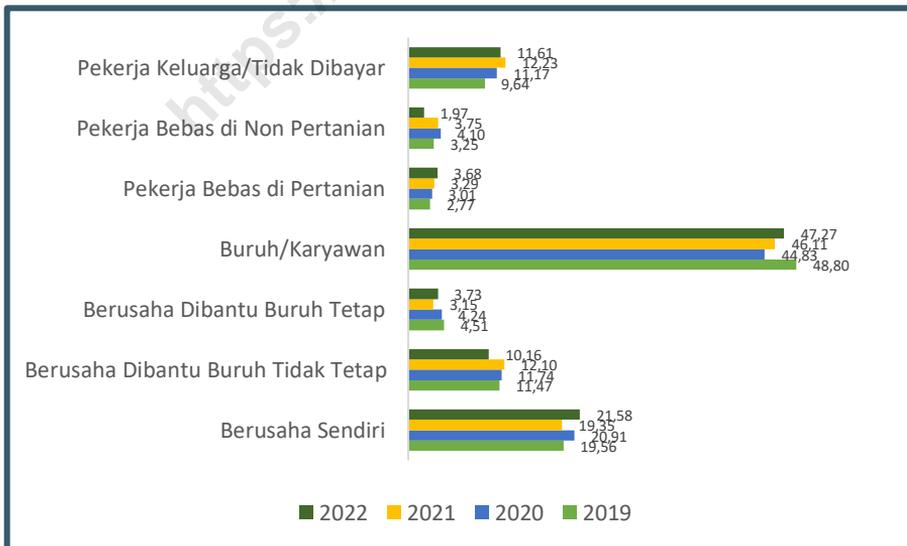
Gambar 1.1 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Agustus 2021 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Agustus 2021

Status/kedudukan pekerjaan adalah kedudukan pekerja dalam pekerjaan utamanya. Status pekerjaan dibedakan menjadi empat kelompok yaitu pengusaha (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu pekerja tetap), buruh/karyawan, pekerja bebas (pertanian dan non pertanian) dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Pekerja keluarga sering diasosiasikan sebagai pekerja pada sektor informal dengan ciri-ciri jumlah jam kerja dan produktivitasnya yang rendah. Sementara itu pekerja dengan status buruh/karyawan dan berusaha dibantu dengan buruh tetap diasosiasikan sebagai pekerja sektor formal.

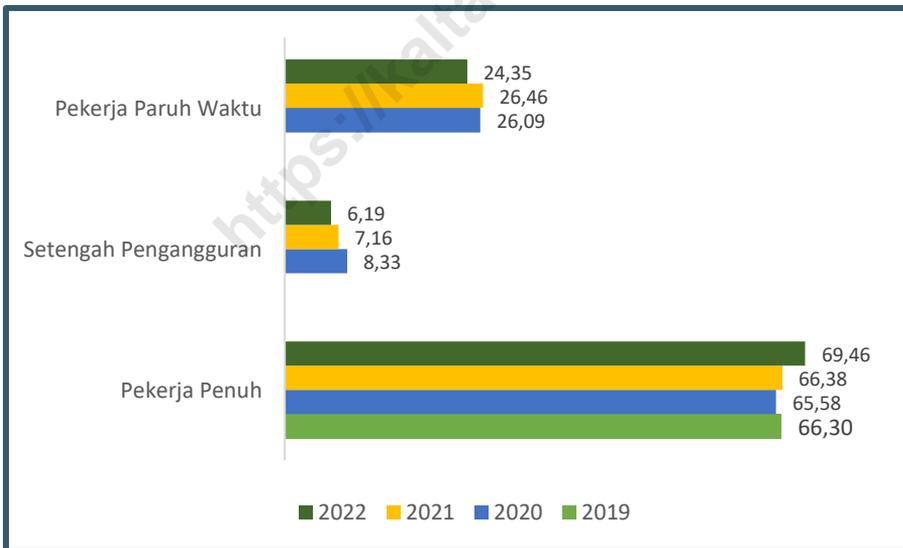
Gambar 1.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Agustus 2021 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Agustus 2021

Status pekerjaan sebagai karyawan/buruh merupakan yang paling dominan dari status pekerjaan penduduk di Kalimantan Utara dari tahun ke tahun. Sayangnya, pekerja dengan status pekerjaan karyawan/buruh merupakan yang paling terdampak selama pandemi COVID-19. Lesunya aktivitas ekonomi banyak membuat pekerja mengalami PHK oleh pemberi kerja. Akibatnya, sejumlah karyawan/buruh harus beralih mencari pekerjaan lain atau berusaha sendiri.

Gambar 1.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, Agustus 2021 (Persen)

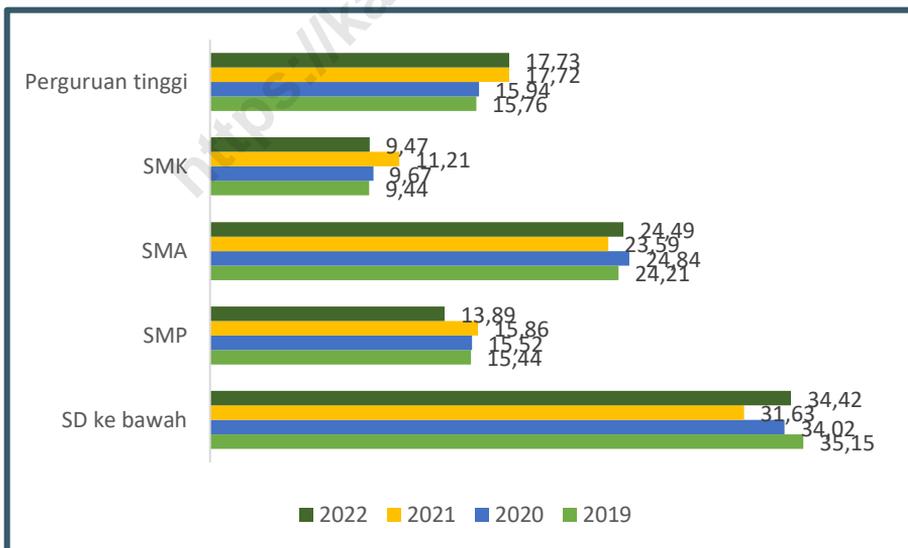


Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Agustus 2021

Jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir. Di Kalimantan Utara, sebagian besar

penduduk bekerja sebagai pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu). Namun, persentase pekerja penuh sempat menurun pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19, dan kembali meningkat pada 2021 dan 2022. Persentase pekerja penuh pada Agustus 2022 sebanyak 66,38 persen, sementara sisanya, 33,62 persen merupakan pekerja tidak penuh yang jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu. Pekerja tidak penuh dikelompokkan dalam dua kategori yaitu setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu, masing-masing sebesar 7,16 persen dan 26,46 persen.

Gambar 1.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Terakhir, Agustus 2019-2022 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Agustus 2021

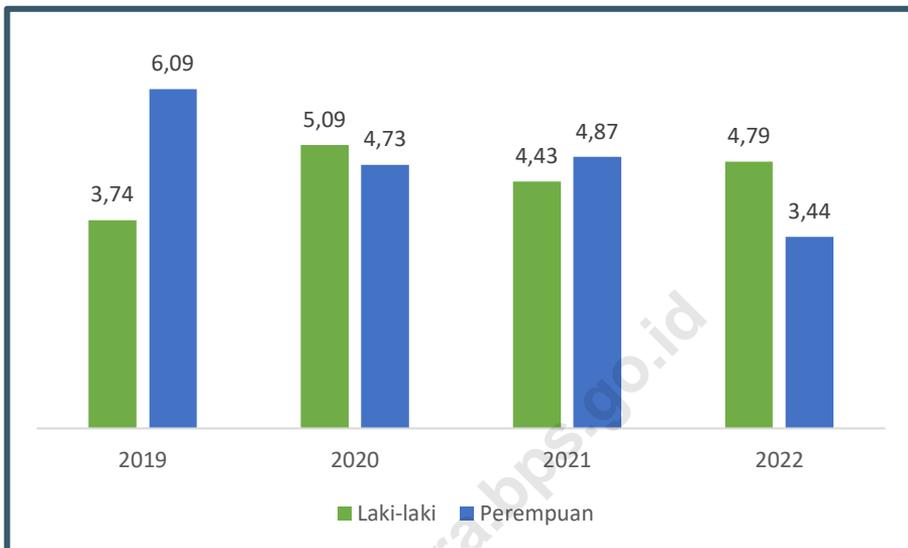
Menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pekerja di Provinsi Kalimantan Utara memiliki pendidikan terakhir SD ke bawah. Saat pandemi COVID-19, pesentase pekerja dengan pendidikan terakhir SD terlihat menurun. Sebaliknya, pekerja dengan pendidikan terakhir di atas SD justru meningkat.

Dari sisi pengangguran, indikator tingkat pengangguran terbuka (TPT) terlihat sudah mulai membaik. Pada 2019, tercatat TPT sebesar 4,49 persen. Selanjutnya, pada awal tahun 2020, kasus COVID-19 mulai masuk di Provinsi Kalimantan Utara. Berbagai sektor terdampak akibat adanya pandemi ini. Penerapan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat mengakibatkan kegiatan ekonomi terhambat. Dampaknya, tingkat pengangguran pada 2020 naik menjadi 4,97 persen.

Di awal masa pemulihan, seiring membaiknya kondisi perekonomian, TPT mulai kembali dapat ditekan. TPT tahun 2021 turun menjadi 4,58 persen. Penurunan TPT ini terus berlanjut hingga pada Agustus 2022 tercatat sebesar 4,33 persen.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, selama empat tahun terakhir, TPT penduduk perempuan justru semakin menurun. Adanya pandemi tidak membuat TPT perempuan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, TPT laki-laki yang sebelumnya lebih rendah daripada TPT perempuan, menjadi lebih tinggi saat pandemi hingga saat ini pada Agustus 2022. TPT laki-laki mencapai 4,79 persen, sementara TPT perempuan hanya 3,44 persen.

Gambar 1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2019-2022 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Agustus 2021

Gambar 1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Wilayah Tempat Tinggal, Agustus 2019-2022 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas), Agustus 2021

Secara umum, TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan. Baik di perkotaan, maupun perdesaan, sama-sama terdampak pandemi COVID-19. Namun, dampak di daerah perkotaan lebih terasa daripada di perdesaan. Hal ini terlihat dari peningkatan TPT tahun 2020 di daerah perkotaan yang lebih besar dibandingkan perdesaan. Pada masa pemulihan ekonomi tahun 2021, TPT di kedua daerah tersebut kembali menurun. Bahkan, untuk daerah perdesaan, TPT terus menurun hingga tahun 2022 tercatat hanya 2,48 persen, lebih baik daripada tahun 2019.

<https://kaltara.bps.go.id>



## BAB II

### DAMPAK COVID-19 TERHADAP KETENAGAKERJAAN



Penyebaran virus COVID-19 terus meluas semenjak pertama kali kasus pertama dikonfirmasi pada awal Maret 2020. Di Provinsi Kalimantan Utara, kasus pertama positif COVID-19 dikonfirmasi tanggal 27 Maret 2020 di Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan. Semenjak itu, jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 semakin meningkat dan menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, total kasus terkonfirmasi positif hingga tanggal 17 November 2022 mencapai 45.864 kasus. Dari jumlah tersebut, 44.829 orang telah sembuh, dan 159 dalam proses pemantauan.

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak pada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Terdampaknya aktivitas ekonomi berimbas pada dinamika ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Utara. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak.

Dampak pandemi COVID-19 diantaranya penduduk bekerja menjadi pengangguran, penduduk yang menjadi bukan angkatan kerja, penduduk yang sementara menjadi tidak bekerja, dan pengurangan jam kerja. Dampak yang paling banyak dialami penduduk usia kerja adalah adanya pengurangan jam kerja akibat berbagai pembatasan yang diterapkan saat masa pandemi COVID-19.

**Tabel 2.1 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, Agustus 2020-2022**

Komponen (1)	Agustus 2020 (2)	Agustus 2021 (3)	Agustus 2022 (4)
Pengangguran karena COVID-19	3160	2953	269
Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19	1141	1434	409
Sementara Tidak Bekerja karena COVID-19	4267	5272	275
Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	62887	45018	10932
<b>Total</b>	<b>71455</b>	<b>54677</b>	<b>11885</b>
Penduduk Usia Kerja	522.832	535.007	547.170
Persentase terhadap PUK	13,67	10,22	2,17

Keterangan:

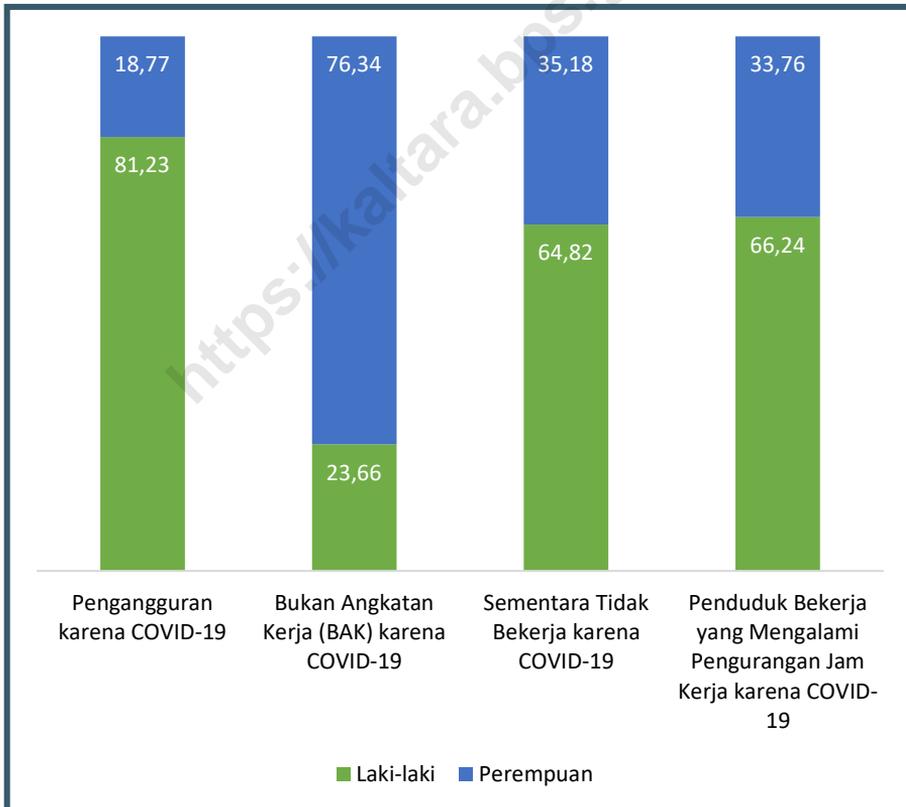
1. Pengangguran karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk pengangguran dan memiliki pengalaman berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.
2. Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 adalah penduduk usia kerja yang termasuk bukan angkatan kerja dan pernah berhenti bekerja karena Covid-19 sejak Februari 2020.
3. Sementara Tidak Bekerja karena Covid-19 adalah penduduk bekerja namun karena Covid-19 menjadi sementara tidak bekerja

Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS)

Selama tiga tahun terakhir, total penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 semakin berkurang. Dampak COVID-19 banyak dirasakan pada awal pandemi tahun 2020. Sebanyak 71.455 penduduk usia kerja merasakan dampaknya. Selanjutnya, tahun 2021,

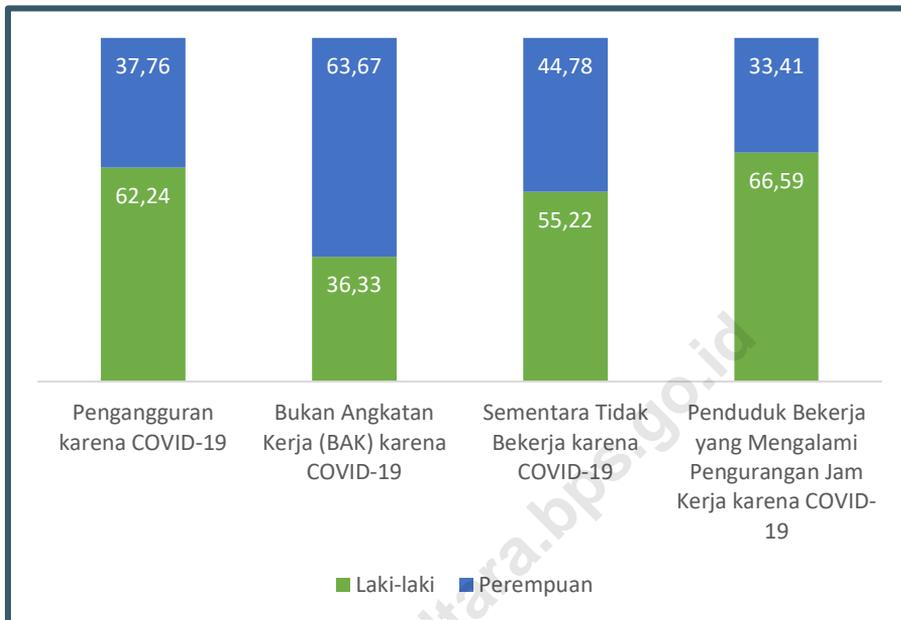
jumlah penduduk usia kerja yang terkena imbas pandemi COVID-19 mulai berkurang, walaupun masih cukup banyak (54.677 orang). Hingga tahun 2022, seiring menurunnya kasus COVID-19 dan terus membaiknya perekonomian, jumlah penduduk usia kerja yang merasakan dampak COVID-19 berkurang hingga 78,26 persen menjadi 11.885 orang saja.

Gambar 2.1 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2020 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS)

Gambar 2.2 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2021 (Persen)

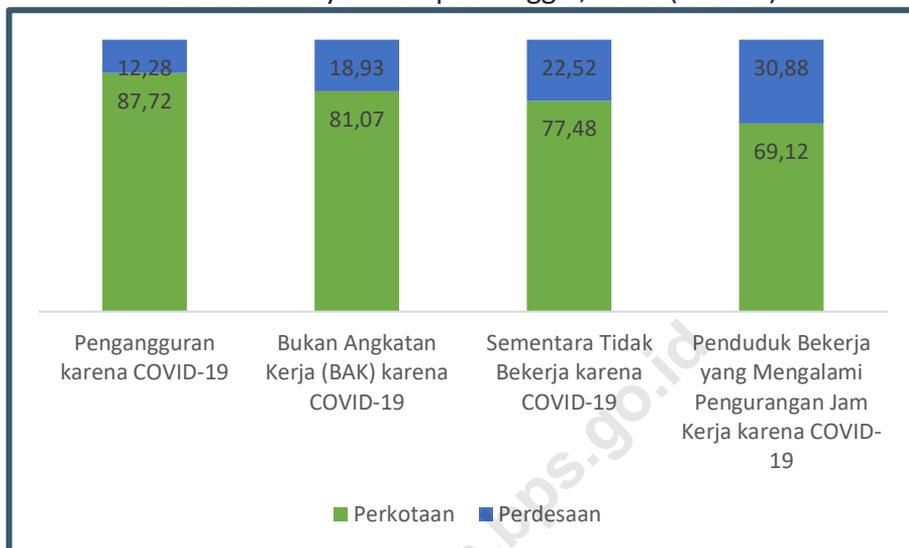


Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS)

Berdasarkan jenis kelamin, baik pada tahun 2020, maupun 2021, penduduk usia kerja laki-laki terdampak COVID-19 lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini juga terjadi jika dilihat pada setiap jenis dampak yang dialami, kecuali pada bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19.

Apabila dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri di wilayah perkotaan lebih besar daripada wilayah perdesaan. Pada semua jenis dampak COVID-19, persentase penduduk perkotaan jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk perdesaan.

Gambar 2.3 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal, 2020 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS)

Gambar 2.4 Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja Menurut Wilayah Tempat Tinggal, 2021 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Ketenagakerjaan Nasional (SAKERNAS)





# BAB III

## PERKEMBANGAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

<http://kaltara.pps.go.id>



### 3.1 KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan faktor yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Penduduk mempunyai dua peran sekaligus, sebagai subyek dan obyek pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk kemakmuran masyarakat yang berarti posisi penduduk dalam hal ini adalah sebagai obyek pembangunan yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Di sisi lain, penduduk juga dapat dipotensikan sebagai penggerak pembangunan yang berarti peran penduduk sebagai subyek pembangunan yang tidak hanya menikmati hasil tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan.

Jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi (perpindahan penduduk). Laju perubahan pada masing-masing faktor tersebut sangat menentukan besaran jumlah dan struktur penduduk. Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023 (Juni), jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 meningkat 2,25 persen, dari 701,8 ribu jiwa pada 2020 menjadi 713,6 ribu jiwa pada 2021. Jumlah ini relatif sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada provinsi lain di Indonesia.

Jika dilihat dari strukturnya, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara masih didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk pada kelompok usia di bawah 30 tahun sekitar 52,47

persen dari total penduduk. Sementara itu, penduduk usia produktif (15-64 tahun) sekitar 70,48 persen.

Tabel 3.1 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota (1)	Rasio Jenis Kelamin	
	2020 (2)	2021 (3)
Malinau	114,6	114,2
Bulungan	115,0	114,7
Tana Tidung	114,5	114,2
Nunukan	113,2	112,9
Tarakan	107,9	107,6
Kalimantan Utara	111,9	111,6

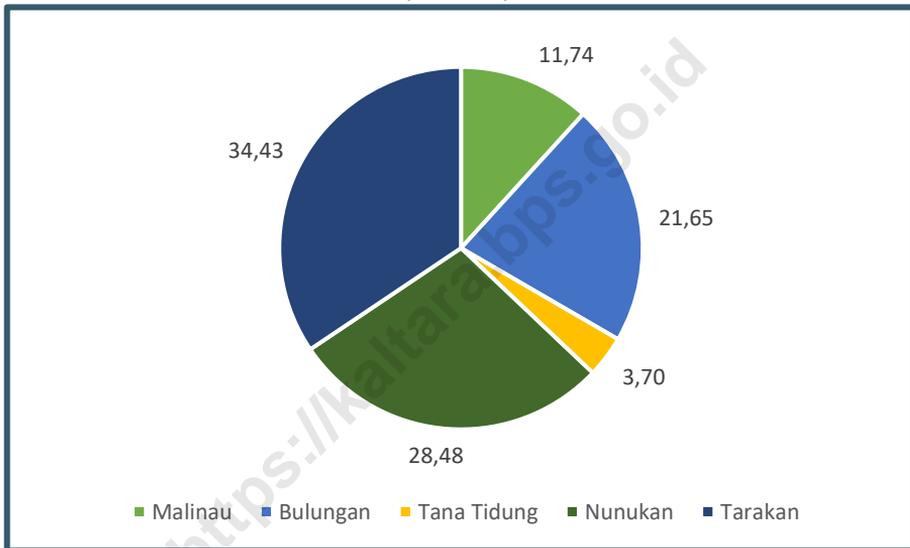
Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020 dan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kalimantan Utara lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Angka *sex ratio* tahun 2021 sebesar 111,6 menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan, terdapat 111-112 penduduk laki-laki. Fenomena ini terjadi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, dimana jumlah penduduk laki-laki selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.

Persebaran penduduk di Kalimantan Utara secara geografis dapat dikatakan belum merata. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Utara, 34,43 persen dari total penduduk, masih terkonsentrasi di Kota Tarakan. Selanjutnya, Kabupaten Nunukan menempati urutan kedua jumlah penduduk terbanyak, sebesar 28,48

persen dari total penduduk. Sementara itu, wilayah yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tana Tidung, hanya sekitar 3,70 persen dari total penduduk.

Gambar 3.1 Persebaran Penduduk Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen)



Sumber: BPS, Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Persebaran penduduk yang tidak merata memberikan dampak terhadap kesenjangan tingkat kepadatan penduduk. Terdapat kabupaten/kota yang kepadatannya tinggi dan kabupaten/kota yang tingkat kepadatannya masih sangat rendah. Secara total, kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9 jiwa/km<sup>2</sup>, artinya setiap 1 km<sup>2</sup> wilayah dihuni oleh 9 penduduk.

Tabel 3.2 Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Malinau	2	2
Bulungan	11	11
Tana Tidung	5	5
Nunukan	14	15
Tarakan	968	980
Kalimantan Utara	9	9

Sumber: BPS, Sensus Penduduk 2020 dan Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023

Pada tingkat kabupaten/kota, kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kota Tarakan, sebanyak 980 penduduk setiap km<sup>2</sup>. Sementara itu, kepadatan penduduk di Kabupaten Malinau hanya 2 penduduk setiap km<sup>2</sup>. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Tarakan dibandingkan kabupaten/kota lain didorong adanya sarana prasarana dan infrastruktur yang lebih baik dibanding keempat kabupaten lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat mengurangi kesenjangan persebaran penduduk, diperlukan pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Utara.

### 3.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan kualitas manusia. Semakin tinggi pendidikan, semakin baik kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang bermoral dan berkualitas sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan

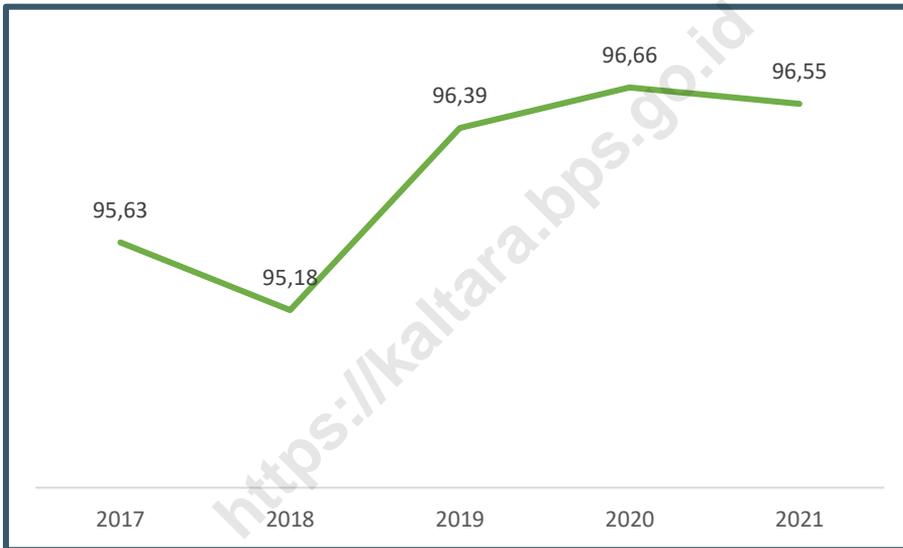
pembangunan bangsa. Harapannya, peningkatan kualitas pendidikan akan memacu kemajuan pada bidang-bidang lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat beragam indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas pendidikan pada suatu wilayah. Indikator pendidikan terbagi menjadi tiga macam, yaitu indikator input, indikator proses, dan indikator proses. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Salah satu indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator input adalah rasio murid-guru. Indikator proses merupakan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator proses antara lain angka partisipasi sekolah (APS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM). Indikator output merupakan hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan. Indikator pendidikan yang termasuk dalam indikator output antara lain angka melek huruf, angka buta huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah.

Secara makro, ukuran mendasar tingkat pendidikan adalah tingkat melek huruf. Angka melek huruf (AMH) yang dirilis BPS merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. AMH dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program

pengentasan buta huruf, menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis, serta menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

Gambar 3.2 Angka Melek Huruf Provinsi Kalimantan Utara, 2017-2021 (Persen)

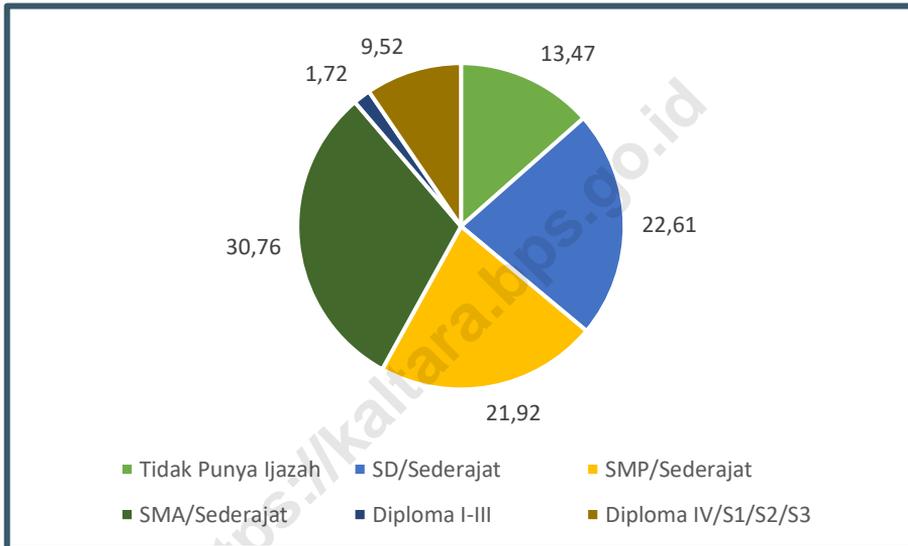


Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selama lima tahun terakhir, AMH Provinsi Kalimantan Utara berada pada kisar 95-96 persen. Tahun 2021, AMH Kalimantan Utara sebesar 96,55 persen, artinya mayoritas penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sudah dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Dilihat menurut jenis kelamin, AMH laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan AMH perempuan. AMH penduduk laki-laki

sebesar 97,00 persen, sedangkan AMH perempuan sebesar 96,04 persen.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2021 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

Selain angka melek huruf, kualitas pendidikan di suatu wilayah juga ditinjau dari tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk. Sebagian besar penduduk di Provinsi Kalimantan Utara memiliki ijazah/STTB tertinggi setingkat SMA/ sederajat (30,76 persen), selanjutnya SD/Sederajat (22,61 persen) dan SMP/Sederajat (21,92 persen). Penduduk yang mampu menamatkan pendidikan hingga DIV/S1/S2/S3 masih tergolong minim, hanya sekitar 9,52 persen. Sementara itu, penduduk yang tidak mempunyai ijazah/STTB pun cukup banyak, sebanyak 13,47 persen.

Tingkat partisipasi penduduk pada pendidikan dapat dilihat melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). APS merupakan indikator yang mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan. Semakin tinggi nilai APS menunjukkan semakin banyak penduduk yang dapat menikmati sarana pendidikan.

Tabel 3.3 APS, APM, dan APK, 2020-2021

Indikator Pendidikan (1)	Tahun	
	2020 (2)	2021 (3)
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>		
7-12 tahun	98,94	98,67
13-15 tahun	96,52	96,51
16 - 18 tahun	76,08	76,50
<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>		
SD/Sederajat	93,46	93,38
SMP/Sederajat	79,09	79,21
SMA/Sederajat	64,75	65,37
<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>		
SD/Sederajat	100,54	99,78
SMP/Sederajat	101,47	100,90
SMA/Sederajat	98,31	96,55

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2020-2021

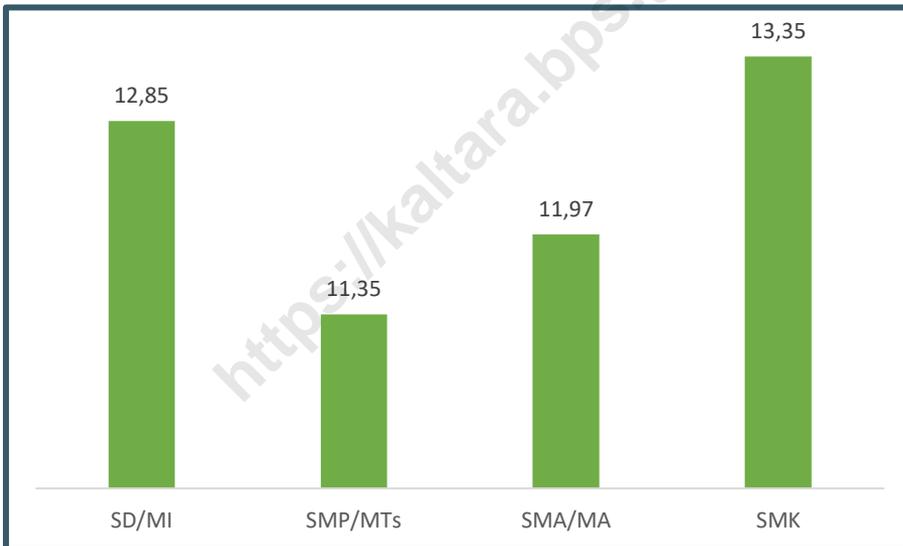
Pada tahun 2021, APS untuk kelompok umur 7-12 tahun sebesar 98,67 persen, artinya setiap 100 anak usia 7-12 tahun, terdapat satu sampai dua anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi (drop out). APS untuk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 96,51 dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 76,50 persen. APM mengindikasikan proporsi anak usia sekolah yang dapat sekolah tepat waktu. APM tertinggi pada tingkat pendidikan SD/Sederajat sebesar 93,38. APM pada tingkat SMP/Sederajat sebesar 79,21 persen dan APM pada tingkat SMA/Sederajat sebesar 65,37 persen. APK menggambarkan partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan tanpa mempertimbangkan usia. APK tertinggi pada tingkat SMP/Sederajat, sebesar 100,90. APK tingkat SD/Sederajat sebesar 99,78 dan tingkat SMA/Sederajat sebesar 96,55.

Jika dicermati, baik APS maupun APM, menunjukkan adanya kecenderungan penurunan setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait akses pendidikan menengah dan tinggi yang capaiannya belum setinggi pendidikan dasar.

Program peningkatan kualitas pendidikan juga perlu didukung dari kualitas layanan pendidikan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan adalah rasio murid guru. Rasio murid guru dihitung dengan membandingkan jumlah murid dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru pada daerah tertentu.

Rasio murid guru tahun ajaran 2021/2022 berada pada kisaran 11-14 untuk jenjang SD/Sederajat hingga SMA/Sederajat dan SMK. Rasio murid guru terkecil pada tingkat SMP, sebesar 11,35, yang artinya setiap satu orang guru harus menjangkau 11-12 murid. Semakin kecil rasio murid guru akan semakin mudah pengawasan yang dilakukan sehingga kualitas pengajaran cenderung semakin tinggi.

Gambar 3.4 Rasio Murid-Guru, 2021/2022



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### 3.3 Kesehatan

Gambaran umum kondisi kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara dapat tercermin melalui derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan merupakan profil kesehatan di suatu daerah. Derajat

kesehatan dapat diukur melalui berbagai indikator, tidak hanya indikator dari sektor kesehatan saja, tetapi juga dari sisi demografi dan lingkungan.

Menurut teori yang dikemukakan Hendrik L. Blum, terdapat empat faktor yang mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Dari keempat faktor tersebut, beberapa indikator yang dapat ditinjau untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat diantaranya Umur Harapan Hidup (UHH), kesehatan ibu dan anak, status gizi, kondisi kesehatan lingkungan, dan pengendalian penyakit.

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

Selama kurun waktu 2013-2022, UHH Provinsi Kalimantan Utara terus menunjukkan peningkatan. Selama periode tersebut, UHH telah meningkat 0,65 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan penduduk di Provinsi Kalimantan Utara semakin membaik, artinya rata-rata penduduk menjadi lebih sehat sehingga dapat hidup lebih lama.

UHH Provinsi Kalimantan Utara tercatat mencapai 72,67 tahun pada 2022. Dengan demikian, penduduk Provinsi Kalimantan Utara

yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang hidup hingga sekitar usia 72 tahun 8 bulan. UHH Provinsi Kalimantan Utara terbilang cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia, bahkan telah melampaui UHH nasional yang hanya 71,85 tahun.

Tabel 3.4 Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Malinau	15,94	15,56	15,76
Bulungan	21,23	23,92	22,50
Tana Tidung	17,21	17,71	17,43
Nunukan	19,73	21,77	20,68
Kota Tarakan	34,64	33,51	34,09
Provinsi Kalimantan Utara	24,76	25,65	25,18

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

Selain umur harapan hidup, kondisi kesehatan masyarakat juga tercermin dari indikator morbiditas. Hasil Survei Sosia Ekonomi Nasional pada Maret 2021 menunjukkan bahwa terdapat 25,18 persen penduduk di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai keluhan kesehatan, menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini diukur dengan menggunakan pendekatan penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terahir dari pelaksanaan survei. Keluhan kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik

karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain.

Jika ditinjau menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, kecuali Malinau dan Tarakan. Kabupaten dengan persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan tertinggi yaitu Kota Tarakan, dengan persentase 34,09 persen.

Tabel 3.5 Angka Kesakitan di Provinsi Kalimantan Utara Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota (1)	Jenis Kelamin		Total (4)
	Laki-Laki (2)	Perempuan (3)	
Malinau	6,24	6,92	6,56
Bulungan	9,87	11,80	10,78
Tana Tidung	6,69	6,99	6,82
Nunukan	7,13	10,90	8,88
Kota Tarakan	5,49	20,12	12,60
Provinsi Kalimantan Utara	6,93	13,88	10,23

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

Sementara itu, untuk angka kesakitan, persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Hal ini berarti, tidak semua penduduk yang mengalami keluhan kesehatan merasa aktivitasnya menjadi terganggu. Tahun 2021, angka kesakitan di Provinsi Kalimantan Utara

sebesar 10,23 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sama seperti dengan persentase keluhan kesehatan, angka kesakitan penduduk perempuan juga lebih tinggi daripada laki-laki. Angka kesakitan penduduk perempuan mencapai 13,88 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya 6,93 persen.

Indikator selanjutnya yang menjadi determinan derajat kesehatan adalah kesehatan ibu dan anak. Masalah terkait kesehatan ibu dan anak masih menjadi persoalan penting yang harus dihadapi. Kementerian kesehatan menyebutkan bahwa disparitas kesehatan ibu dan anak dipengaruhi faktor geografis, seperti daerah terpencil dan kepulauan; ketersediaan fasilitas kesehatan dan obat-obatan terjangkau belum terpenuhi; kurangnya tenaga kesehatan; dan masalah finansial dalam mengakses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa indikator yang dinilai peka dan telah disepakati secara nasional sebagai ukuran derajat kesehatan terkait kesehatan ibu dan anak meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan status gizi bayi/balita.

Menurut batasan dari *Tenth Revision of the International Classification of Disease* (ICD-10), kematian ibu adalah kematian wanita yang terjadi saat kehamilan, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan. Kematian ibu disebabkan oleh kejadian yang berhubungan dengan kehamilan atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut atau penanganannya. Selama tahun 2021, data jumlah kasus kematian ibu dapat dilihat pada tabel 3.6. Dari 12.998 bayi lahir hidup,

terdapat 29 kasus kematian ibu, yang terbanyak dari Kabupaten Bulungan.

Tabel 3.6 Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, 2021

Kabupaten/Kota (1)	Jumlah Lahir Hidup (2)	Jumlah Kematian Ibu (3)
Malinau	1 646	2
Bulungan	2 359	9
Tana Tidung	498	2
Nunukan	3 760	8
Tarakan	4 735	8
Kalimantan Utara	12 998	29

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 3.7 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Melahirkan dalam Dua Tahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota (1)	Tenaga Medis (2)	Perawat/ Bidan (3)	Non Tenaga Kesehatan (4)	Jumlah (5)
Malinau	52,67	43,42	3,91	100,00
Bulungan	40,71	57,88	1,41	100,00
Tana Tidung	36,20	60,99	2,81	100,00
Nunukan	26,60	67,24	6,16	100,00
Tarakan	46,56	53,44	0,00	100,00
Provinsi Kalimantan Utara	39,98	57,40	2,62	100,00

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

Dilihat dari penolong proses kelahiran, sebagian besar proses persalinan perempuan yang melahirkan dalam dua tahun terakhir dibantu oleh tenaga medis dan perawat/bidan. Sebanyak 39,98 persen dibantu oleh tenaga medis dan 57,40 persen dibantu bidan/perawat. Walaupun demikian, masih terdapat juga yang dibantu oleh non tenaga Kesehatan sebanyak 2,62 persen.

Upaya pembangunan kesehatan harus dimulai sejak dini. Hal ini dapat dimulai dari imunisasi. Imunisasi merupakan upaya perlindungan terhadap penyakit menular yang dapat dicegah, seperti Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Polio dan Campak.

Tabel 3.8 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi Lengkap di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Malinau	58,24	59,77	58,96
Bulungan	72,89	73,21	73,05
Tana Tidung	56,29	73,13	64,68
Nunukan	61,65	49,40	55,94
Tarakan	75,03	72,57	73,77
Kalimantan Utara	67,82	64,88	66,38

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

Tahun 2021, persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap masih sebesar 66,38 persen, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya 56,07 persen. Walaupun demikian, persentase ini masih perlu ditingkatkan. Kurangnya tingkat imunisasi disebabkan

masih minimnya kesadaran orang tua terkait imunisasi, khawatir dampak dari imunisasi, dan isu seputar kehalalan vaksin. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap yaitu Kota Tarakan (73,77 persen), sementara persentase terendah yaitu Kabupaten Nunukan (55,94 persen).

### 3.4 Perumahan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam teori Hendri L. Blum, lingkungan adalah faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap derajat kesehatan. Kondisi lingkungan yang memiliki dampak terhadap kesehatan individu/masyarakat diantaranya ketersediaan air bersih, keadaan sanitasi, dan kondisi perumahan.

Persentase rumah tangga yang tinggal di rumah milik sendiri di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2021 sebesar 69,60 persen. Hampir seluruh rumah yang ditinggali rumah tangga memiliki lantai bukan tanah. Sebagian besar atap rumah terbuat dari seng (95,62 %) dan dinding kayu (58,95%). Menurut *American Public Health Association* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai per kapita/orang minimal adalah 10 m<sup>2</sup>. Hasil Susenas Maret 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat rumah tangga dengan luas lantai per kapita rumahnya kurang dari 10 m<sup>2</sup>, mencapai 17,11 persen.

Persentase rumah tangga di Provinsi Kalimantan Utara yang telah menggunakan sumber air minum bersih mencapai 80,04 persen.

Air bersih yang dimaksud disini yaitu yang berasal dari ledeng, air kemasan, pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik) lebih dari 10 meter. Sementara itu, persentase rumah tangga yang mempunyai akses air minum layak sebesar 86,80 persen.

Tabel 3.9 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Bersih dan Akses Air Minum Layak di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota (1)	Sumber Air Minum Bersih (2)	Akses Air Minum Layak (3)
Malinau	73,95	70,85
Bulungan	77,39	75,44
Tana Tidung	70,30	85,88
Nunukan	68,74	85,46
Tarakan	93,27	98,73
Kalimantan Utara	80,04	86,80

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, persentase rumah tangga dengan sumber air minum bersih tertinggi adalah Kota Tarakan, mencapai 93,27 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Nunukan, hanya 68,74 persen.

Untuk sarana sanitasi, 92,44 persen rumah tangga telah memiliki fasilitas buang air untuk digunakan anggota rumah tangga sendiri. Kepemilikan jamban sendiri sangat penting dalam suatu rumah tangga terkait dengan kebersihan dan pencegahan penyakit

yang banyak bersumber dari kotoran manusia. Walaupun demikian, masih terdapat rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar, sekitar 2,93 persen. Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar tertinggi adalah Kabupaten Nunukan.

Tabel 3.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar di Provinsi Kalimantan Utara, 2021 (Persen)

Kabupaten/Kota (1)	Ada, digunakan hanya ART sendiri (2)	Ada, digunakan bersama atau umum (3)	Tidak Ada/ Tidak Diguna- kan (4)
Malinau	91,87	4,04	3,56
Bulungan	97,84	2,16	0,00
Tana Tidung	94,63	3,17	2,20
Nunukan	90,33	4,18	5,49
Tarakan	91,35	6,48	2,18
Kalimantan Utara	92,44	4,60	2,97

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

### 3.4 Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Mengingat data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka dilakukan pendekatan melalui pengeluaran rumah tangga.

Secara umum konsumsi/pengeluaran rumah tangga terbagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu konsumsi/pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Dengan kedua jenis pengeluaran tersebut, dapat dilihat bagaimana pola konsumsi masyarakat. Tingkat kebutuhan/permintaan (demand) terhadap kedua kelompok pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas akan mendahulukan pemenuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Proporsi pengeluaran rata-rata perkapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2021 untuk kelompok Bukan Makanan lebih besar daripada Makanan. Pengeluaran rata-rata per kapita kelompok bukan makanan sebesar 811.876 rupiah, sedangkan kelompok makanan sebesar 742.834 rupiah. Walaupun demikian, jika dilihat menurut wilayah, di wilayah perdesaan, proporsi pengeluaran untuk kelompok makanan lebih besar dibandingkan kelompok bukan makanan, sebaliknya di wilayah perkotaan, proporsi pengeluaran untuk kelompok makanan lebih kecil dibandingkan kelompok bukan makanan.

Gambar 3.5 Persentase Pengeluaran Penduduk Perkapita Menurut Wilayah dan Subkelompok Makanan dan Bukan Makanan, 2021 (Persen)



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret 2021

Pada tabel 3.11 dapat dilihat rata-rata pengeluaran perkapita sebulan kelompok makanan terlihat menurun pada tahun 2021. Penurunan ini disebabkan penurunan pada kelompok komoditas telur dan susu, buah-buahan, makanan dan minuman jadi, serta rokok. Pengeluaran makanan didominasi oleh pengeluaran kelompok komoditas makanan minuman jadi sebesar 198.942 rupiah atau 26,78 persen dari total pengeluaran kelompok makanan. Selanjutnya pengeluaran untuk kelompok ikan (98.341 rupiah) dan rokok (87.453 rupiah). Sementara itu, pengeluaran terkecil adalah pengeluaran pada kelompok umbi-umbian, hanya 9.234 rupiah.

Tabel 3.11 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Makanan, 2020-2021

Kelompok Komoditas (1)	Nilai (Rp/Kapita/Bulan)	
	2020 (2)	2021 (3)
Padi-padian	77 496	86 412
Umbi-umbian	6 726	9 234
Ikan	95 813	98 341
Daging	35 832	39 506
Telur dan Susu	47 429	45 762
Sayur-sayuran	53 598	62 291
Kacang-kacangan	11 375	12 517
Buah-buahan	30 845	28 049
Minyak dan Kelapa	14 171	16 041
Bahan minuman	21 873	24 550
Bumbu-bumbuan	16 796	17 957
Bahan Makanan Lainnya	13 826	15 780
Makanan Minuman Jadi	230 433	198 942
Rokok dan Tembakau	87 681	87 453
<b>Jumlah</b>	<b>743 894</b>	<b>742 834</b>

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sementara itu, pengeluaran rata-rata perkapita pada kelompok bukan makanan meningkat pada 2021. Peningkatan ini didorong peningkatan pada pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa, serta pajak, pungutan dan asuransi. Pengeluaran terbesar pada kelompok bukan makanan adalah pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 449.976 rupiah atau 55,42 persen dari total pengeluaran kelompok bukan makanan, sementara yang paling kecil

pada kelompok keperluan pesta dan upacara/kenduri sebesar 9.655 rupiah.

Tabel 3.12 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan, 2020-2021

Kelompok Komoditas (1)	Nilai (Rp/Kapita/Bulan)	
	2020 (2)	2021 (3)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	419 050	449 976
Aneka Barang dan Jasa	185 898	186 887
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	37 107	36 418
Barang Tahan Lama	82 814	67 927
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	53 409	61 015
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	23 517	9 655
<b>Jumlah</b>	<b>801 796</b>	<b>801 796</b>

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

### 3.5 Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan sehingga

standar yang digunakan untuk menentukan penduduk sebagai penduduk miskin atau bukan miskin adalah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan sebagai dasar penghitungan penduduk miskin pada bulan Maret tahun 2022 berbeda antarwilayah, dengan kecenderungan bahwa garis kemiskinan pedesaan lebih rendah dibandingkan garis kemiskinan perkotaan. Di daerah perkotaan angka garis kemiskinan sebesar 804.517 rupiah per kapita/bulan, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 719.982 rupiah per kapita/bulan. Secara rata-rata, garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 772.914 rupiah per kapita/bulan.

Tabel 3.13 Garis Kemiskinan Menurut Daerah, Maret 2022

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	591 239	213 278	804 517
Perdesaan	525 335	194 647	719 982
<b>Kalimantan Utara</b>	566 292	206 622	772 914

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada Maret 2022, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan atau yang lebih dikenal dengan penduduk miskin sebanyak 49,46 ribu jiwa, sedangkan persentase penduduk miskin sebesar 6,77 persen.

Tabel 3.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	26,55	5,66
Perdesaan	22,91	8,75
<b>Kalimantan Utara</b>	<b>49,46</b>	<b>6,77</b>

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selain persentase penduduk miskin yang lebih besar, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di perdesaan juga lebih besar daripada besaran kedua indeks tersebut di perkotaan. Pada bulan Maret 2022, indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar 1,155, sedangkan di perkotaan sebesar 0,741. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan di perdesaan sebesar 0,250, sedangkan di perkotaan sebesar 0,151.

Tabel 3.15 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Menurut Daerah, September 2021-Maret 2022

Indeks	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan</b>			
September 2021	0,785	1,068	0,893
Maret 2022	0,741	1,155	0,890
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan</b>			
September 2021	0,170	0,179	0,173
Maret 2022	0,151	0,250	0,186

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Jl. H. Masykur RT 19, Tanjung Selor Hilir, 77212  
Telp.: (0552) 2035120, e-mail: bps6500@bps.go.id  
homepage: <http://kaltara.bps.go.id>

ISSN 2723-2379



9 772723 237001